

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)**

**Robi Maulana M.**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Email: Maulana77robi@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to determine how the influence of the government accounting system on the quality of financial reports, the influence of the internal control system on the quality of financial reports, the effect of good governance on the quality of financial reports, and the effect of the government accounting system, internal control system and good governance simultaneously on the quality of financial reports. . The object of this research is the Regional Work Unit of Majalengka Regency.*

*This research uses descriptive analysis method and verification analysis method with data collection techniques using purposive sampling technique in which the sample used is determined based on criteria. Respondents in this study were the Head of Service, Secretary / General Affairs, and treasurer / financial management division at the Work Unit of Majalengka Regency, totaling 64 people. In this study, there are independent variables, namely the government accounting system, internal control system, and good governance, and the dependent variable is the quality of financial reports. The data analysis techniques used were correlation coefficient analysis, determination coefficient analysis, and hypothesis testing (t test and f test).*

*Based on the results of this study it can be concluded that the government accounting system affects the quality of financial reports, the internal control system affects the quality of financial reports, good governance affects the quality of financial reports, and the government accounting system, internal control system and good governance simultaneously affect the quality of reports. finance..*

*Keywords : Government Accounting System, Internal Control System, Good Governance, Quality of Financial Statements.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000 dalam Nurillah, 2014).

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik. Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina Rasdianto, 2013:21). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK yang berupa opini. Jenis opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Pendapat atau opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu : 1) Kesesuaian dengan SAP; 2) Kecukupan pengungkapan; 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) Efektifitas sitem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : kompetensi

sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah/sistem akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, *good governance*, dan kualitas aparatur pemerintah.

Karena pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh lemahnya SAP, SPI dan *good governance*. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD TA 2014 di hampir seluruh Pemda yaitu tentang : a) Penatausahaan aset tetap yang belum tertib diantaranya tanah pemda yang belum bersertifikat dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya; b) Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil; c) Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid; d) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut, khususnya yang diterima Pemda dari BPJS Kesehatan pada periode Januari s.d. April 2014 atau sebelum terbitnya Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi; dan e) Keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh Pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda. (<http://bandung.bpk.go.id/>).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul : **“Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan *Good Governace* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja**

**Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)”**

## **LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS LANDASAN TEORI**

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan daerah (Rohaeti, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik (Nordiawan, 2008), diantaranya :

1. Basis Akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah menggunakan dua basis akuntansi yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca.
2. Sistem pembukuan. Sistem pembukuan pada pemerintah menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2010:163) sistem pengendalian intern meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pada dasarnya sistem pengendalian intern merupakan rangkaian proses kegiatan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:71) ada 5 (lima) komponen pengendalian intern yaitu : 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penaksiran/penilaian risiko; 3) Aktivitas/kegiatan pengendalian; 4) Sistem informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan.

### ***Good Governance***

Menurut Mardiasmo (2009 : 17) *Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya.

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Menurut UNDP ( *United Nations Development Program* ) dalam Rahardjo Adisasmita (2011:23), karakteristik *good governance* meliputi : a) *Participation*; b) *Rule of law*; c) *Transparancy*; d) *Responsiveness*; e) *Consensus orientation*; f) *Equity*; g) *Efficiency and effectiveness*; h) *Accountability*; dan i) *Strategic vision*.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa “Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu : 1) Relevan; 2) Andal; 3) Dapat dibandingkan; dan 5) Dapat dipahami.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Hubungan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang biasa dikerjakan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Oleh karena itu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sedangkan Mardiasmo (2009:35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuat keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik.

Menurut Dahri et.al. (2015) dalam penelitiannya bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H<sub>1</sub> : sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

**Hubungan Sistem Pengendalian Intern Dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Pengendalian intern adalah suatu tindakan pimpinan dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andal, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011). Masih ditemukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang diisyaratkan yaitu, keterandalan. Pengendalian internal merupakan cara yang dapat memberikan arahan serta mengawasi sumber daya suatu organisasi serta memiliki peran dalam pencegahan penggelapan atau *fraud* dan melindungi sumber daya organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 2 menyatakan bahwa “Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Menurut Asep (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H<sub>2</sub> : sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Hubungan *Good Governance* Dengan Kualitas Laporan Keuangan**

Pada pemerintahan pusat maupun daerah, berbagai pelanggaran yang

bertentangan dengan *good governance* masih sering terjadi, seperti petinggi pemerintahan yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas, penyajian laporan keuangan yang kurang akurat, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif, serta pertanggung jawaban atas setiap aktivitas masih lemah. Hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi antara entitas pemerintah terhadap masyarakat luas, sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan seperti korupsi yang semakin marak.

Penerapan *good governance* yang berdasarkan 9 karakteristik meliputi adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan kerangka hukum yang tanpa pandang bulu, keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, pelayanan yang cepat dan responsive, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban kepada publik atas segala aktivitas yang dilakukan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi jauh ke depan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2006) dalam (Yusniar, 2016), menemukan bahwa penerapan *good governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan sistem keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaporan keuangan berdasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas

publik, pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat

$H_3$  : *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka sedangkan pengambilan sampel dan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Pengujian instrument penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan alat analisis data yaitu analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan uji normalitas data, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, serta Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Tabel 1  
Deskriptif Hasil Responden

Deskriptif	Keterangan	Frekuensi	Presentase
Jumlah Sampel		64	100%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	38	59%
	Perempuan	26	41%
Usia	20-30 thn	4	6%
	31-40 thn	8	13%

	41-50 thn	11	17%
	>50 thn	41	64%
Lama Bekerja	0-10 thn	8	12%
	11-20 thn	10	15%
	21-30 thn	6	10 %
	>30 thn	40	63%

Sumber : Data Diolah Sendiri, 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui jumlah responden terbanyak adalah responden laki-laki dengan jumlah 38 orang (59%) sedangkan responden perempuan berjumlah 26 orang (41%). Usia responden terbanyak adalah berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 41 orang (64%), usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 11 orang (17%), responden yang berusia antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 8 orang (13%), dan responden yang berusia antara 20 sampai 30 tahun sebanyak 4 orang (6%). Lama bekerja responden dapat diketahui bahwa lama bekerja responden dengan lama kerja lebih dari 30 tahun sebanyak 40 orang (63%), kemudian diikuti dengan responden dengan lama bekerja 11 sampai 20 tahun sebanyak 10 orang (15%), responden dengan lama bekerja 0 sampai 10 tahun sebanyak 8 orang (12%) sedangkan responden dengan lama bekerja 21 sampai 30 tahun sebanyak 6 orang (10%).

### Uji Validitas

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintahan

Variabel $X_1$	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$ ( $\alpha=5\%$ )	Ket.
Pernyataan 1	0,728	0,2461	Valid
Pernyataan 2	0,741	0,2461	Valid
Pernyataan 3	0,762	0,2461	Valid
Pernyataan 4	0,717	0,2461	Valid
Pernyataan 5	0,791	0,2461	Valid
Pernyataan 6	0,756	0,2461	Valid
Pernyataan 7	0,659	0,2461	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3  
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern

Variabel X <sub>2</sub>	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub> (α=5%)	Ket.
Pernyataan 1	0,398	0,2461	Valid
Pernyataan 2	0,622	0,2461	Valid
Pernyataan 3	0,594	0,2461	Valid
Pernyataan 4	0,570	0,2461	Valid
Pernyataan 5	0,571	0,2461	Valid
Pernyataan 6	0,522	0,2461	Valid
Pernyataan 7	0,639	0,2461	Valid
Pernyataan 8	0,637	0,2461	Valid
Pernyataan 9	0,480	0,2461	Valid
Pernyataan 10	0,543	0,2461	Valid
Pernyataan 11	0,439	0,2461	Valid
Pernyataan 12	0,503	0,2461	Valid
Pernyataan 13	0,484	0,2461	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4  
Hasil Uji Validitas *Good Governance*

Variabel X <sub>3</sub>	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub> (α=5%)	Ket.
Pernyataan 1	0,667	0,2461	Valid
Pernyataan 2	0,476	0,2461	Valid
Pernyataan 3	0,717	0,2461	Valid
Pernyataan 4	0,725	0,2461	Valid
Pernyataan 5	0,696	0,2461	Valid
Pernyataan 6	0,704	0,2461	Valid
Pernyataan 7	0,832	0,2461	Valid
Pernyataan 8	0,710	0,2461	Valid
Pernyataan 9	0,623	0,2461	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 5  
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Variabel Y	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub> (α=5%)	Ket.
Pernyataan 1	0,479	0,2461	Valid
Pernyataan 2	0,644	0,2461	Valid

Pernyataan 3	0,594	0,2461	Valid
Pernyataan 4	0,559	0,2461	Valid
Pernyataan 5	0,345	0,2461	Valid
Pernyataan 6	0,656	0,2461	Valid
Pernyataan 7	0,798	0,2461	Valid
Pernyataan 8	0,811	0,2461	Valid
Pernyataan 9	0,496	0,2461	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3,4 dan 5 hasil uji validitas semua variable menunjukkan hasil bahwa r<sub>hitung</sub> lebih besar dari r<sub>tabel</sub> pada taraf signifikansi 5% yakni sebesar 0,227. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan tersebut valid.

### Uji Reliabilitas

Tabel 6  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Total Soal	Cronbach's Alpha	r <sub>tabel</sub>	Ket.
Sistem Akuntansi Pemerintahan	7	0,913	0,246	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	13	0,867		Reliabel
<i>Good Governance</i>	9	0,885		Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	9	0,863		

Sumber : Data diolah sendiri, 2020

Berdasarkan tabel 6, nilai r<sub>hitung</sub> semua variabel lebih besar dari r<sub>tabel</sub> yaitu 0,227, Hal ini berarti data tersebut reliabel dan layak di analisis.

### Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 7  
Hasil Analisis Koefisien Korelasi

		Sistem Akuntansi Pemerintahan	Sistem Pengendalian Intern	Good Governance	Kualitas Laporan Keuangan
Sistem Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	1	,403**	,477**	,612**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,000
	N	64	64	64	64
Sistem Pengendalian Intern	Pearson Correlation	,403**	1	,315*	,508**
	Sig. (2-tailed)	,001		,011	,000
	N	64	64	64	64
Good Governance	Pearson Correlation	,477**	,315*	1	,627**
	Sig. (2-tailed)	,000	,011		,000
	N	64	64	64	64
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	,612**	,508**	,627**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	64	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa keeratan hubungan antara sistem akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan termasuk kedalam kategori korelasi kuat dan searah, artinya semakin baik sistem akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik dan sebaliknya. Keeratan hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan masuk ke dalam kategori korelasi sedang dan searah artinya jika sistem pengendalian intern cukup baik maka kualitas laporan keuangan cukup baik juga dan sebaliknya. Sedangkan keeratan hubungan antara *good governance* dengan kualitas laporan keuangan termasuk ke dalam kategori korelasi kuat dan searah, artinya jika *good governance* baik maka kualitas laporan keuangan baik juga dan sebaliknya.

Tabel 8  
Hasil Koefisien Korelasi berganda  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 <sup>a</sup>	,572	,551	3,029

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern

b. Dependent Variable: Kualitas laporan Keuangan

Sumber: Data diolah , 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa keeratan hubungan sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan *good governance* dengan kualitas laporan keuangan termasuk ke dalam kategori kuat dan searah, jika sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan *good governance* baik maka kualitas laporan keuangan baik juga dan sebaliknya.

### Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 8, besarnya kontribusi pengaruh sistem akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 37,45%. Besarnya kontribusi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 25,81%. sementara Besarnya kontribusi pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 39,31%.

Besarnya kontribusi sistem akuntansi pemerintahan (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan *good governance* (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 57,15% dan sisanya sebesar 42,85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9  
Uji t

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Signifikansi
System akuntansi pemerintahan	3,187	2,000	0,002
System	2,728	2,000	0,008



Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

pengendalian intern			
Good governance	4,043	2,000	0,000

Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara parsial Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
3. *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

### Saran

1. Diharapkan dapat mempertahankan sistem akuntansi pemerintahan secara menyeluruh dengan terus melakukan pengawasan terhadap pencatatan transaksi, meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dibidang akuntansi sektor publik serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam

mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian intern yang memadai dengan memperhatikan lingkungan pengendalian dan struktur organisasi dalam memantau setiap tanggungjawab/kegiatan yang diberikan kepada pegawai terutama dalam penyusunan laporan keuangan agar pihak pengelola keuangan daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Diharapkan dapat meningkatkan kembali tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membuat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta menunjang kualitas laporan keuangan yang andal dan relevan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak intern maupun pihak ekstern

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Adi Patra, A. Dahri et.al. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Vol. 02 No. 01. STIE Muhammadiyah Palopo.
2. Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
3. Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 24 No. 1. Universitas Islam Riau.
4. Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Asep. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
7. Azlim, dkk. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala.
8. Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit Brama Ardian.
9. Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS19 (Edisi Kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
10. Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur*. Jurnal Study & Accounting Research, Vol XI, No. 1. STIE STEMBI. Bandung.
11. Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2015 *tentang Standar Akuntansi Keuangan*. Indra, Bastian. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
12. Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
13. Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
14. Mashuri. 2009. *Penelitian Verifikatif*. Yogyakarta: Andi. Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
15. Narimawati, Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.
16. Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
17. Nordiawan, Dedi et.al. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. Nurillah. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

18. Oktarina, Mia. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*. *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang.
19. Permana. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas (Survei Pada Dinas Kota Bandung)*.
20. Riduwan dan Akdon, 2010. *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika, Cet.2*. Alfabeta: Bandung.
21. Rini, Adhariani Sarah. 2014. *Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
22. Rohaeti, Een Leni. 2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada DPKAD Kabupaten Majalengka*. Skripsi. Universitas Majalengka.
23. Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Djambatan.
24. Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
25. Siti, Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. *Auditing, Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
26. Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian (Cetakan Ke-24)*. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
27. Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
28. Ulum, Ihyaul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik:Sebuah Pengantar*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
29. Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
30. Yusniar et.al. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)*. *Jurnal Magister Akuntansi Vol. 5 No. 2*. Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala.
31. Peraturan-Peraturan :
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 *tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

35. Peraturan Menteri keuangan No. 59/PMk 06/2005 *tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
36. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang pengelolaan keuangan daerah.*  
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
37. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
38. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*